

Konsep KEK Batam Berbeda

BATAM – Badan Pengusahaan (BP) Batam masih menunggu kebijakan pemerintah pusat terkait bentuk Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di Batam. Sementara kalangan pengusaha ingin kepastian hukum dalam berusaha.

Kepala BP Batam Lukita Dinarsyah Tuwo mengatakan konsep penerapan KEK Batam berbeda dengan daerah lainnya. Sejauh ini sesuai dengan yang

”

Banyak pertanyaan dari mereka, jika ada kelebihan insentif ini akan ada di KEK, mengapa tidak ditambahkan saja di fasilitas FTZ.

JADI RAJAGUKGUK

Ketua Kadin Batam

disampaikan Menteri Koordinator (Kemenko) Perekonomian Darmin Nasution bahwa KEK akan dimulai dari kawasan Nongsa.

"Ada tiga cara dalam penetapan KEK, pertama adalah diusulkan oleh badan usaha, kedua usulan oleh Pemerintah Daerah (Pemda) dan ketiga adalah pemerintah pusat.

Ke hal 2))

Konsep KEK...

((Dari hal 1

Untuk Batam kita ambil opsi yang ke-tiga karena lahannya saat ini masih menjadi milik pemerintah pusat," kata Lukita.

Terkait penolakan sejumlah asosiasi pengusaha yang ada di Batam, pihaknya akan mengajak mereka duduk bersama untuk membahas apa yang menjadi kekhawatiran pengusaha tersebut. Kepastian hukum *free trade zone* (FTZ) 70 tahun diakuinya memang benar, namun pemerintah ingin memberikan insentif yang lebih kepada pengusaha, untuk itu diterapkannya KEK.

Lukita mengaku sudah menyampaikan kepada Tim Teknis Dewan Kawasan untuk melakukan pertemuan bersama antara BP dan juga pelaku usaha. Supaya apa yang menjadi keraguan selama ini bisa disampaikan dan dijamin pemerintah bahwa dalam penerapan ini tidak akan mengganggu kegiatan dunia usaha.

"Kelancaran arus barang memang menjadi kekhawatiran pengusaha, tapi hal ini juga nanti akan dibahas oleh tim teknis," jelasnya.

Ketua Kamar Dagang Indonesia (Kadin) Kota Batam Jadi Rajagukguk menyampaikan pihaknya akan membuat Rapat Koordinasi (Rakor) untuk membahas peralihan FTZ ke KEK tersebut. Rakor akan digelar Jumat (10/5) mendatang dan hasilnya akan disampaikan kepada Wali Kota Batam, Kepala BP Batam, dan DPRD kota Batam. "Pada prinsipnya pihak kami sebagai mitra pemerintah, sehingga nanti hanya menyambut aspirasi para pengusaha," kata Jadi.

Jadi mengatakan, kekhawatiran pengusaha jika KEK diterapkan adalah terkait kepastian hukum dalam berusaha. "Banyak pertanyaan dari mereka, jika ada kelebihan insentif ini akan ada di KEK, mengapa tidak ditambahkan saja di fasilitas FTZ," katanya.

Selain itu, para pengusaha juga mempertanyakan siapa

yang akan mengurus FTZ dan KEK. Sehingga akan banyak yang ikut campur urusan FTZ atau KEK, jika keduanya tetap ada di Batam.

"Kami belum tahu KEK itu seperti apa, siapa yang menjadi operator di FTZ dan siapa operator di KEK, ini akan menjadi masalah baru lagi," jelasnya.

Mengenai status hukum dari KEK, hal lain yang ditanyakan menyangkut regulasi yang mengatur KEK. Jika FTZ sudah diatur dalam undang-undang, maka KEK yang dikeluarkan melalui Keputusan Presiden harus menganulir Undang-undang tersebut.

"Kalau mau diterapkan KEK, lebih baik di kawasan tertentu. Kalau di Tanjung Sauh tidak ada masalah karena bukan daerah otonom Batam, ataupun Rempang Galang yang belum banyak pemukiman," kata Jadi.

Selain itu, kata Jadi, perlu juga dijelaskan ke masyarakat, bahwa kalau KEK diterapkan bukan otomatis uang wajib tahunan (UWT) dihapus karena KEK tidak mengatur soal bebas sewa lahan. "Yang ada jika tidak ada lagi FTZ, maka bahan kebutuhan pokok dan barang lainnya akan menjadi mahal," katanya.

Ketua INSA Batam Osman Hasyim juga menyatakan hal serupa. Pengusaha, katanya, hanya menginginkan kepastian hukum karena jika kebijakan berubah maka sudah pasti akan memberikan dampak terhadap dunia usaha di Batam.

Osman menyarankan jika pemerintah ingin memberikan insentif lebih, bisa dengan cara memperjuat FTZ. Selain masa berlakunya selama 70 tahun, FTZ juga dianggap masih bisa menjadi tumpuan ekonomi Batam jika dibenahi lebih baik. Sehingga ini akan lebih bisa memberikan kepastian hukum bagi investor.

"Kalau KEK menurut saya langkah kemunduruan. Karena dulu pernah diterapkan sebelum FTZ," jelasnya.

● ahmad rohmadi

Pemko Batam Tanam 3.300 Pohon



Pemko Batam menanam 3.300 berbagai jenis pohon di sepanjang Jembatan Layang Lualan Madani sampai Simpang Kabil, Batam Center, Minggu (6/5) pagi. Gerakan ini menjadi tahap awal pencahangan Gerakan Menanam Sejuta Ketapang Kencana.

Kepala BP Batam Lukita Dinarsyah Tuwo dan Pangdam I Bukit Barisan Mayjen TNI Ibnu Triwidodo ikut menanam pada kegiatan tersebut. Bibit pohon ditanam sepanjang 3,3 kilometer dari Jembatan Layang Lualan Madani sampai Simpang Kabil atau 46 titik.

Paling banyak bibit pohon yang ditanam adalah

Ketapang Kencana sebanyak 1.300 batang. Lalu sisanya Tabebuaya, Mahoni, Trembesi, Salam dan Flamboyan yang bertotal 2.000 batang. "Hari ini titik awal. Setiap dua atau tiga bulan kembali ada gerakan penanaman. Batam akan hijau semua," ujar Wali Kota Batam Muhammad Rudi.

Pemko mengajak BP Batam, Kepolisian, TNI, Pramuka, Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Batam dan organisasi kemasyarakatan dalam gerakan penanaman pohon tersebut. ●

**FOTO DAN NARASI:
HUMAS PEMKO BATAM**

Pangdam I Bukit Barisan Mayjen TNI Ibnu Triwidodo, Wali Kota Batam Muhammad Rudi, dan Kepala BP Batam Lukita Dinarsyah Tuwo bersama peserta Batam Menanam Sejuta Ketapang Kencana.



Wali Kota Batam Muhammad Rudi menanam pohon Ketapang Kencana dalam gerakan Batam Menanam Sejuta Ketapang Kencana



Wakil Wali Kota Batam Amsakar Achmad menanam pohon Ketapang Kencana



Panglima Kodam I Bukit Barisan Mayjen TNI Ibnu Triwidodo didampingi Wali Kota Batam Muhammad Rudi dan pimpinan FKPD Batam menekan sirine pencahangan Gerakan Batam Menanam Sejuta Ketapang Kencana.

